

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

MSG (*Melanesia Spearhead Group*) merupakan organisasi regional antarpemerintah yang terbentuk dari pertemuan informal Kepala Pemerintahan Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan FLNKS (*Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste*) di Goroka, Papua Nugini pada 17 Juli 1986. Pada 23 Maret 2007, MSG secara resmi terbentuk setelah setiap anggota menandatangani *the Agreement Establishing the Melanesian Spearhead Group* di bawah hukum internasional. Sebelum terbentuk, MSG bekerja secara *ad hoc* hingga akhirnya bermarkas di Port Villa, Vanuatu. Organisasi antarpemerintah ini bertujuan untuk menghimpun negara yang memiliki identitas yang sama untuk mencapai tujuan bersama yang salah satunya adalah keamanan (MSG, n.d.).

Indonesia yang memiliki berbagai macam etnis dan ras yang salah satunya adalah Melanesia. Warga Melanesia di Indonesia yang berjumlah hampir 11 juta ini banyak tersebar di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Karena keberadaan ini, Indonesia memiliki kedekatan dengan negara anggota MSG. Melalui Dubes A.M Farchir, Indonesia menegaskan komitmen serius Pemerintah untuk memajukan kerjasama konkrit dengan negara-negara anggota MSG (Kemlu, 2012). Hubungan tersebut semakin membaik ketika Indonesia bergabung menjadi *observer* pada MSG Leader Summit ke-18 di Fiji tanggal 31 Maret 2011 (MSG, 2011). Selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2015 yang bertepatan dengan MSG Leader Summit ke-20 di Kepulauan Solomon. Indonesia ditetapkan menjadi *Associate Member* (Kemlu, 2015).

Akan tetapi, alasan keberadaan Etnis Melanesia di Indonesia tidak bisa dijadikan tolok ukur Indonesia mau bergabung dengan MSG. Hal ini dikarenakan tidak semua warga Melanesia sejalan dengan pemerintah Indonesia. Di Papua Barat sendiri, ada kelompok yang sangat berseberangan dengan pemerintah Indonesia. Kelompok ini menamakan dirinya sebagai ULMWP (*United Liberation Movement for West Papua*). Berdasarkan pertanyaan ketua ULMWP Benny Wenda, kelompok ini

bertujuan untuk kemerdekaan dan kebebasan bagi warga Papua Barat (ULMWP, n.d.). Bagi pemerintah Indonesia, kelompok ini dianggap sebagai kelompok separatis yang hanya mewakili sebagian kecil dari warga Papua di luar negeri. Seperti yang disampaikan oleh M.I. Derry Aman, Wakil Kepala Perwakilan RI di KBRI Canberra selaku Ketua *Senior Official Meeting* RI sebelum pertemuan tingkat menteri di MSG. Bahkan pemerintah Indonesia tidak pernah menyebut ULMWP di hadapan publik. Pemerintah Indonesia cenderung menggunakan “gerakan separatis” terhadap kelompok ini (Dewi, 2018). Kelompok ini berhasil masuk karena ada dukungan dari beberapa aktor internasional seperti Vanuatu dan FLNKS. Meski begitu, keanggotaan ULMWP masih dipermasalahkan mengingat kelompok ini hanyalah peninjau yang mewakili sekelompok kecil separatis yang bedomisili di luar negeri (Firmansyah, 2018). Situasi ini menyebabkan dilema bagi Indonesia. Disatu sisi, Indonesia mau menjalin hubungan baik dengan negara-negara di Pasifik Selatan. Namun, di sisi lain dalam MSG terdapat kelompok separatis dan beberapa negara yang mendukungnya.

Penelitian tentang MSG cenderung membahas awal mula hingga peran dari masing-masing negara anggota MSG. Lawson (2013, pp. 1-22) menjelaskan tentang sejarah perkembangan politik masyarakat Melanesia dari awal penyebutan “Melanesia” hingga menjadi organisasi regional MSG. Lawson berpendapat bahwa organisasi ini didirikan oleh Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu yang didorong oleh keinginan untuk membuktikan bahwa negara Melanesia mendukung FLNKS. Sedangkan Tarte (2014, pp. 312-324) dan MacQueen (1989, pp. 33-52) memaparkan perkembangan di bidang perubahan iklim dan keamanan serta integrasi ekonomi regional di Melanesia. Namun penelitian tersebut masih belum menyinggung keterkaitan Indonesia dalam memberikan peran di MSG. Sementara itu, May (2011, pp. 1-7) dan Blades (2014, pp. 23-39) membahas tentang peran dari negara diluar MSG dan negara anggota MSG. Keduanya, hanya membahas tentang alasan ULMWP bisa bergabung dengan MSG. Dengan bergabungnya ULMWP di MSG menyebabkan adanya kerenggangan hubungan diantara negara anggota pendiri. Terkait dengan peran Indonesia, Lawson (2016, pp. 506-524) memaparkan keanggotaan yang ditawarkan oleh masyarakat Papua Barat, sudut

pandang Indonesia dalam melihat MSG sebagai organisasi regional, dan perluasan dan pengembangan regional terhadap perpolitikan dunia. Berbeda pula dengan penelitian Kurnia (2016, pp. 1-55) dan Tampubolon (2015, pp. 1-15) yang memaparkan kerjasama teknik dan pendidikan yang dilakukan Indonesia terhadap negara anggota MSG. Serta penelitian Ramadhan (2018) yang hanya menjelaskan sebab-akibat peningkatan status Indonesia di MSG.

Penelitian ini menawarkan sisi yang berbeda karena membahas cara Indonesia mempengaruhi negara anggota MSG dengan *soft power*. Penelitian ini menjelaskan pendekatan Indonesia melalui budaya, nilai-nilai dalam negeri, dan kebijakan luar negeri yang membangun *soft power*. Dengan *soft power*, Indonesia dapat mempengaruhi, menarik perhatian, membujuk, dan membuat pihak lain untuk bertindak sesuai dengan keinginan kita tanpa menggunakan paksaan atau kekerasan. Kepentingan dalam negeri Indonesia adalah membendung berkembangnya ULMWP di Melanesia khususnya diakui sebagai anggota MSG. Dengan kehadiran Indonesia sebagai wakil dari masyarakat MSG, maka akan melemahkan posisi ULMWP di MSG.

Oleh karena itu penelitian ini akan menambah pemahaman tentang *soft power* yang dilakukan Indonesia untuk bergabung menjadi anggota MSG dan memahami kepentingan Indonesia bergabung dengan MSG untuk membendung ULMWP. Penelitian ini juga akan menjadi masukan bagi pemerintah Indonesia untuk menunjukkan dan memanfaatkan *soft power* sebagai cara halus untuk mendapatkan simpati internasional.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini ingin menjawab pertanyaan: “Bagaimana cara Indonesia menggunakan *soft power* untuk mempengaruhi negara anggota MSG terhadap ULMWP?”

I.3. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan konsep *soft power* yang digagas oleh Joseph S. Nye. Sebelum membahas tentang *soft power*, perlu dipahami tentang kekuasaan.

Kekuasaan (*power*) menurut Nye (2004, p. 2) adalah kemampuan untuk mempengaruhi sikap pihak lain untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Definisi lain yang ditawarkan oleh Nye (2004, p. 3) tentang kekuasaan adalah kepemilikan akan kemampuan dan sumber daya yang dapat mempengaruhi hasil. Dalam hal ini, negara yang kuat dapat dilihat dari populasi yang banyak dan wilayah yang luas, sumber daya alam yang melimpah, ekonomi yang kuat, militer, dan stabilitas sosial masyarakat termasuk budaya sebagai nilai dan kebiasaan dalam masyarakat yang melekat pada negara tersebut. Ada beberapa cara untuk mempengaruhi sikap pihak lain. Cara tersebut adalah memaksa pihak lain dengan ancaman atau dengan kerjasama untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Negara dapat mencapai hasil yang diinginkan dari negara lain karena negara lain menghargai nilai, menganggap sebagai contoh, dan menghargai tingkat kesejahteraan dan keterbukaan sehingga negara lain mengikuti (Nye, 2004, p. 5)

Nye (2004, pp. 6-7) membagi kekuasaan menjadi *Hard Power* dan *Soft Power*. *Hard power* merupakan cara mengubah sikap negara lain dengan militer dan ekonomi. Konsep ini berkaitan dengan bujukan dan ancaman sebagai instrumen utama. Sedangkan acara lain untuk merubah sikap negara lain tanpa menggunakan cara bujukan atau ancaman secara nyata yaitu *soft power*. Jadi, *soft power* adalah kemampuan untuk mempengaruhi, menarik perhatian, membujuk, dan membuat orang lain untuk bertindak sesuai dengan keinginan kita tanpa menggunakan paksaan atau kekerasan. Salah satu cara untuk membedakan *hard power* dan *soft power* adalah dengan mempertimbangkan cara yang digunakan dan keinginan mendapatkan hasil yang diinginkan. *Soft power* mengedepankan kedekatan, sehingga tercipta keinginan untuk kerjasama. Sedangkan *hard power* mengandalkan perintah dan paksaan

Menurut Nye (2004, pp. 7-10) *soft power* mengedepankan nilai, budaya, dan kebijakan negara sebagai sumber untuk menarik dan agenda seting negara lain melalui diplomasi bilateral atau multilateral. Institusi internasional juga dapat membentuk *soft power*. Seperti Inggris dan AS dalam pembentukan standar ekonomi dunia melalui IMF dan WTO. Diplomasi bilateral atau multilateral dapat mempengaruhi daya tarik budaya, nilai-nilai, atau memanipulasi politik dengan

menggagalkan pendapat yang diutarakan pihak lain karena tidak realistis. Jadi, Suatu negara dapat dengan mudah mendapatkan kepentingan dari negara lain karena negara tersebut mempengaruhi dan pengaruh tersebut diikuti oleh negara yang terpengaruh. Dengan kata lain, *soft power* merupakan kemampuan menarik minat pihak lain agar pihak lain terpengaruh sehingga mengeluarkan kebijakan yang diinginkan. Yang perlu ditekankan adalah bagaimana sebuah negara mengatur hubungannya dengan negara lain.

Soft power memiliki tiga instrumen utama yaitu budaya, nilai-nilai dalam negeri, dan kebijakan luar negeri (Nye, 2004, p. 11). Pertama adalah budaya yang masuk dalam politik internasional melalui kebijakan yang diambil oleh negara. Ketika budaya yang dibawa oleh negara mengandung nilai-nilai universal maka negara lain akan mengakui dan menghormati budaya tersebut sebagai identitas dari sebuah negara. Sehingga negara lain akan mengikuti nilai-nilai universal yang ada pada budaya tersebut. Budaya disini termasuk kesamaan budaya tradisional dan pendidikan serta perdagangan sebagai jalur bertukarnya budaya secara cepat dan langsung. Dalam sisi pendidikan negara dapat memberikan beasiswa kepada negara lain untuk belajar di negara yang menyediakan. Hal yang paling ditekankan dalam perdagangan dan pendidikan adalah adanya budaya yang disebarluaskan. Penyebaran ini melalui hubungan langsung, kunjungan, dan pertukaran yang sering terjadi di bidang perdagangan dan pendidikan (Nye, 2004, pp. 11-13).

Kedua tentang nilai-nilai dalam negeri suatu negara. Nilai-nilai dalam negeri suatu negara dapat mempengaruhi *soft power* tergantung dari negara mana yang melihat kebijakan tersebut. Pandangan negara lain terhadap nilai-nilai dalam negeri mempengaruhi *soft power*. Jika nilai-nilai dalam negeri dianggap buruk, maka *soft power* akan melemah. Contohnya adalah hukum yang lemah dalam mengatur senjata api di AS menyebabkan melemahnya *soft power* AS di Eropa atau adanya sikap rasis kepada warga kulit hitam yang berakibat buruk pada hubungan negara-negara Afrika (Nye, 2004, p. 13).

Ketiga adalah kebijakan luar negeri yang berlandaskan nilai-nilai yang kuat seperti demokrasi dan institusi internasional yang diikuti dengan mempromosikan perdamaian dan HAM yang merupakan isu menarik negara lain (Nye, 2004, p. 55).

Negara mengeluarkan kebijakan berdasarkan pada nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Sehingga masyarakat dan negara selalu selaras dalam pengambilan kebijakan (Iser, 2015, pp. 27-45). Ini berarti kebijakan luar negeri merupakan cerminan dari nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Dengan adanya institusi internasional, negara dapat menarik dengan menyebarkan nilai-nilai dalam negeri tersebut dan menyalurkan melalui institusi internasional. Dengan begitu, institusi internasional yang diikuti oleh sebuah negara, dapat membentuk pandangan publik dan menyebarkan tentang nilai-nilai universal seperti menjaga keamanan, mempromosikan demokrasi atau melawan terorisme (Nye, 2004, p. 177). Dengan adanya ketiga instrumen tersebut, maka *soft power* negara dapat dimanfaatkan untuk menjalankan kepentingan luar negerinya.

I.4. Hipotesis

Penelitian ini berhipotesis bahwa Indonesia menggunakan *soft power* melalui budaya, nilai-nilai dalam negeri, dan kebijakan luar negeri. Ketiga instrumen tersebut merupakan instrumen yang menonjol dan dapat dimanfaatkan oleh Indonesia. Dalam budaya menekankan kontak langsung budaya tradisional, beasiswa, dan perdagangan. Nilai-nilai dalam negeri, Indonesia mulai memperhatikan Papua dengan memberi otonomi khusus, pengembangan budaya, pembangunan infrastruktur dan peningkatan HAM. Sedangkan kebijakan luar negeri mengedepankan demokrasi, membangun perdamaian dan menjunjung HAM melalui institusi internasional. Kedua instrumen tersebut digunakan untuk menjalankan kepentingan nasional membendung keanggotaan ULMWP di MSG.

I.5. Metodologi Penelitian

Jenis metodologi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data-data sekunder dari buku, artikel jurnal, majalah, koran, dan artikel daring dengan menggunakan sumber-sumber yang kredibel. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kongruen. Metode kongruen adalah mencari kecocokan antara

variabel independen dari teori yang digunakan dan data-data yang diperoleh selama proses penelitian. Metode ini digunakan untuk membuktikan *soft power* yang dilakukan oleh Indonesia kepada negara anggota MSG untuk mempengaruhi ULMWP.

I.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dibagi menjadi empat bab. Bab 1 merupakan pendahuluan yang merupakan desain riset dari penelitian ini. Bab 2 memaparkan tentang sejarah politik luar negeri Indonesia di Pasifik Selatan. Bab ini akan membahas kebijakan yang dilakukan di setiap rezim. Bab 3 akan menganalisis *soft power* Indonesia yang dilakukan terhadap ULMWP. Bab ini akan berisi tentang analisis *soft power* Indonesia yang didominasi oleh budaya dan kebijakan luar negeri. Bab ini akan menjelaskan *soft power* digunakan untuk melancarkan kepentingan nasional yaitu membendung keanggotaan ULMWP di MSG. Bab 4 adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran penelitian lebih lanjut. Bab ini akan mengemukakan temuan penelitian, apakah hasil penelitian konsisten dengan argument awal peneliti atau justru bertentangan serta memberikan rekomendasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.